

Pengaruh Belanja Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

Hayrun Nisa Eka Afriliani^{1*}, Marselina¹, Moneyzar Usman¹, Dedy Yuliawan¹,
Heru Wahyudi¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email : ^{1*}hayrunnisaeka19@gmail.com, ²marselina@feb.unila.ac.id,
³moneyzarusman@gmail.com, ⁴dedy.yuliawan@feb.unila.ac.id, ⁵heru.wahyudi@feb.unila.ac.id

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Metode dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Variabel terikat yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia dan variabel bebas meliputi belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan dan tingkat pengangguran terbuka. Model terbaik yang diperoleh adalah *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka

Abstract– This study aims to analyze the effect of the education sector in spending areas, the health sector in shopping areas and the level of open reaction to the human development index in district/city throughout Lampung Province. The methods and analytical tools used in this study are panel data regression. The dependent variable used is the human development index and the independent variables include the education sector spending area, the health sector spending area and the number of poor people. The best model obtained is the *Fixed Effect Model*. The results of the study show that spending areas for the education sector, spending areas for the health sector and open unemployment rates have a positive and significant effect on the human development index in district/city throughout Lampung Province.

Keywords : Human Development Index, Regional Expenditure, Open Unemployment Rate

1. PENDAHULUAN

United Nations Development Programme (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menekankan agar pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, nasional, maupun daerah, menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat bagi pembangunan. UNDP menetapkan sebuah indeks sebagai ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator angka harapan hidup saat lahir mengukur kesehatan, indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator pengeluaran per kapita disesuaikan mengukur pengeluaran. Selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (*United Nation Development Programme, UNDP, 1990*).

Indeks Pembangunan Manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan jumlah tenaga kerja akan menciptakan kesejahteraan penduduk.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2015-2020

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia						Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Lampung Barat	64.54	65.45	66.06	66.74	67.50	67.80	66.35
Tanggamus	63.66	64.41	64.94	65.67	66.37	66.42	65.25
Lampung Selatan	65.22	66.19	66.95	67.68	68.22	68.36	67.10
Lampung Timur	67.10	67.88	68.05	69.04	69.34	69.37	68.46
Lampung Tengah	67.61	68.33	68.95	69.73	70.04	70.16	69.14
Lampung Utara	65.20	65.95	66.58	67.17	67.63	67.67	66.70
Way Kanan	65.18	65.74	65.97	66.63	67.19	67.44	66.36
Tulang Bawang	66.08	66.74	67.07	67.7	68.23	68.52	67.39
Pesawaran	62.70	63.47	64.43	64.97	65.75	65.79	64.52
Pringsewu	67.55	68.26	68.61	69.42	69.97	70.30	69.02
Mesuji	59.79	60.72	61.87	62.88	63.52	63.63	62.07
Tulang Bawang Barat	63.01	63.77	64.58	65.30	65.93	65.97	64.76
Pesisir Barat	60.55	61.50	62.20	62.96	63.79	63.91	62.49
Bandar Lampung	74.81	75.34	75.98	76.63	77.33	77.44	76.26
Metro	75.10	75.45	75.87	76.22	76.77	77.19	76.10

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Pada Tabel 1 menunjukkan rata-rata IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2015-2020. Rata-rata IPM tertinggi dipegang oleh Kota Bandar Lampung diikuti oleh Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah berturut-turut pada posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Kabupaten Mesuji menduduki rata-rata peringkat terendah dalam capaian mutu modal manusia pada periode tersebut. Angka Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung berhasil meningkatkan angka harapan hidup, pendidikan, serta standar hidup yang layak bagi masyarakatnya.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran. Dalam analisis ini indikator pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka dan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2017-2020 (Persen)

Wilayah	TPT				IPM			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	0.96	2.76	1.68	2.13	66.06	66.74	67.50	67.80
Tanggamus	5.08	2.23	2.98	2.96	64.94	65.67	66.37	66.42
Lampung Selatan	4.80	4.49	4.70	5.19	66.95	67.68	68.22	68.36
Lampung Timur	3.89	3.83	2.89	2.64	68.05	69.04	69.34	69.37
Lampung Tengah	3.08	2.52	2.62	4.22	68.95	69.73	70.04	70.16
Lampung Utara	5.62	4.87	5.09	5.34	66.58	67.17	67.63	67.67
Way Kanan	2.88	4.45	3.60	3.56	65.97	66.63	67.19	67.44
Tulang Bawang	3.47	3.53	4.04	4.84	67.07	67.7	68.23	68.52
Pesawaran	5.73	4.64	4.42	4.64	64.43	64.97	65.75	65.79
Pringsewu	4.63	4.13	4.95	5.77	68.61	69.42	69.97	70.30
Mesuji	0.65	3.80	3.62	3.71	61.87	62.88	63.52	63.63
Tulang Bawang Barat	1.86	2.93	3.59	3.46	64.58	65.30	65.93	65.97
Pesisir Barat	2.71	1.90	3.26	3.41	62.20	62.96	63.79	63.91
Bandar Lampung	8.10	7.28	7.12	8.79	75.98	76.63	77.33	77.44
Metro	4.64	5.79	5.11	5.40	75.87	76.22	76.77	77.19

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada kemungkinan keterkaitan antara jumlah tingkat pengangguran terbuka dengan Indeks Pembangunan Manusia. Jumlah tingkat pengangguran terbuka yang tinggi akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dapat dilihat yang terjadi Kota Bandar Lampung dengan menurunnya jumlah tingkat pengangguran terbuka maka terjadi kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia. Namun sebaliknya di Kabupaten Tulang Bawang terjadi kenaikan jumlah tingkat pengangguran terbuka tetapi Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan. Terlihat bahwa jumlah pengangguran di seluruh kabupaten lebih sedikit daripada jumlah pengangguran di kabupaten di Provinsi Lampung.

Tabel 3. Alokasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2015-2020 (Persen)

Wilayah	Persentase Alokasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata	Rata-Rata IPM
Lampung Barat	2.64	23.48	23.81	26.75	27.11	28.45	19.17	66.06
Tanggamus	1.06	31.96	34.76	33.36	31.94	32.27	25.29	65.01
Lampung Selatan	1.09	30.64	29.95	31.37	31.37	29.70	23.26	66.85
Lampung Timur	2.17	36.39	38.06	0.04	37.45	32.12	19.17	68.28
Lampung Tengah	1.02	39.12	36.45	37.19	35.96	35.35	28.45	68.93
Lampung Utara	1.64	30.43	31.70	31.61	34.06	30.29	23.85	66.51
Way Kanan	3.01	30.12	23.37	24.28	28.09	24.20	20.19	66.14
Tulang Bawang	2.17	19.58	22.51	22.52	26.22	25.58	16.70	67.16
Pesawaran	1.98	30.67	30.58	29.28	33.05	31.98	23.13	64.26
Pringsewu	2.36	34.28	33.51	33.56	34.23	33.24	25.93	68.76
Mesuji	4.43	20.32	20.68	19.28	23.51	23.84	16.18	61.76
Tulang Bawang Barat	1.58	25.70	28.01	25.33	26.76	27.00	20.16	64.52
Pesisir Barat	2.51	19.11	17.79	20.10	23.72	22.83	14.88	62.20
Bandar Lampung	2.02	40.84	36.92	34.17	32.22	29.19	28.49	76.02
Metro	4.46	3.63	24.78	24.33	22.16	21.04	14.30	75.88

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diolah

Tabel 3 menunjukkan jumlah persentase alokasi belanja daerah sektor pendidikan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki persentase tinggi menunjukkan angka Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi juga. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 4. Alokasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2015-2020 (Persen)

Wilayah	Persentase Alokasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata	Rata-Rata IPM
Lampung Barat	2.97	7.50	11.64	14.96	14.83	18.21	10.38	66.06
Tanggamus	2.55	8.80	8.50	9.73	10.63	12.40	8.04	65.01
Lampung Selatan	1.02	13.43	15.09	13.69	15.77	17.88	11.80	66.85
Lampung Timur	1.65	8.06	9.30	8.84	11.18	13.36	7.81	68.28
Lampung Tengah	1.24	8.24	7.73	7.56	9.45	10.83	6.84	68.93
Lampung Utara	4.19	6.57	11.47	12.43	12.36	13.28	9.40	66.51
Way Kanan	2.61	8.52	9.36	10.60	12.00	10.96	8.62	66.14
Tulang Bawang	5.77	13.53	14.42	13.43	13.79	18.01	12.19	67.16
Pesawaran	1.67	7.65	7.52	10.05	10.26	11.83	7.43	64.26
Pringsewu	2.62	12.39	10.15	11.13	12.22	16.53	9.70	68.76
Mesuji	2.50	6.77	8.55	8.76	10.01	17.19	7.32	61.76

Tulang Bawang Barat	3.95	11.89	8.90	10.33	9.33	12.32	8.88	64.52
Pesisir Barat	4.08	4.62	9.80	9.52	9.41	12.13	7.49	62.20
Bandar Lampung	2.04	10.81	11.74	12.90	13.64	13.10	10.23	76.02
Metro	4.58	4.83	25.05	23.82	27.65	31.54	17.18	75.88

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diolah

Tabel 4 menunjukkan jumlah persentase alokasi belanja daerah sektor kesehatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 bahwa besar alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar gaji. Dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki persentase rendah menunjukkan angka Indeks Pembangunan Manusia yang rendah juga. Namun di beberapa kabupaten seperti Lampung Timur dan Lampung Tengah dengan persentase alokasi anggaran kesehatan yang cukup rendah dapat menunjukkan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian dan Sumber Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga antara lain Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu, alokasi belanja daerah sektor pendidikan, dan alokasi belanja daerah sektor kesehatan, dan tingkat pengangguran terbuka, serta variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Ruang lingkup penelitian ini mencakup 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan data 6 tahun yaitu 2015-2020.

2.2 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis maka, diperlukan analisis data. Untuk mengetahui pengaruh dari satu Variabel bebas terhadap variabel tak bebas dapat dibuat formulasi sebagai berikut

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 PDDK_{it} + \beta_2 KES_{it} + \beta_3 TPT_{it} + u_{it}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (%)

PDDK = Persentase alokasi belanja daerah sektor pendidikan (%)

KES = Persentase alokasi belanja daerah sektor kesehatan (%)

TPT = Jumlah tingkat pengangguran terbuka (%)

$i = 1, 2, \dots, n$, menunjukkan jumlah lintas individu (*cross-section*).

$t = 1, 2, \dots, t$, menunjukkan dimensi runtut waktu (*time series*).

β_0 = Konstanta (*intercept*).

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi.

μ = *Error term*.

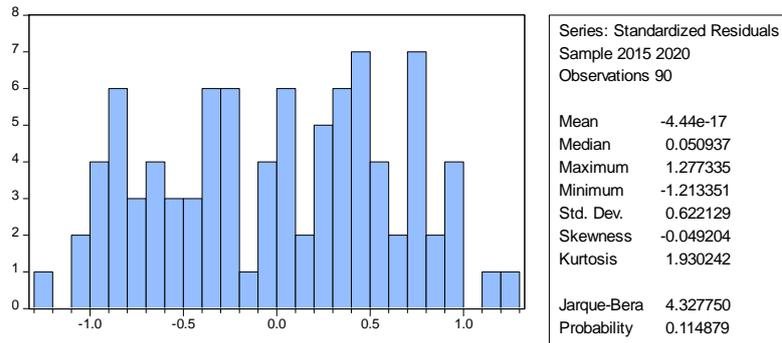
2.3 Uji Asumsi Klasik

Pada saat melakukan analisa regresi data panel, maka perlu dipenuhi beberapa asumsi, misalnya asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, deteksi multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas



Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Gambar 1. Deteksi Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang terlihat pada gambar 3. bahwa nilai *P-value* Jarque-Bera sebesar 0.114879 di mana lebih besar dari pada (α) 5 persen (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini data terdistribusi normal.

3.1.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Variabel	PDDK	KES	TPT
PDDK	1.000000	0.494982	-0.007210
KES	0.494982	1.000000	0.043530
TPT	-0.007210	0.043530	1.000000

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 5, didapat hasil uji multikolinieritas dimana koefisien korelasi antar tiga variabel bebas dalam penelitian ini menunjukkan angka koefisien yang kurang dari 0,80 sehingga dapat disimpulkan melalui uji multikolinieritas ini bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas yang tinggi.

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

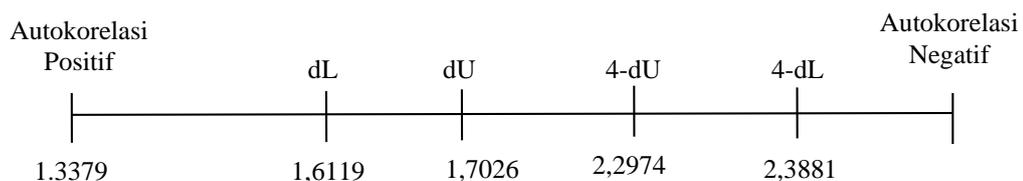
Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.624435	0.149187	4.185586	0.0001
PDDK	-0.006886	0.004218	-1.632435	0.1062
KES	0.015725	0.008824	1.782119	0.0783
TPT	0.021273	0.024708	-0.860985	0.3916

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Dari hasil regresi di atas dapat disimpulkan bahwa model FEM yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas karena nilai dari masing-masing variabel dependent $x_1, x_2, x_3,$ dan x_4 lebih besar dari nilai $\alpha= (5\%)$

3.1.2 Uji Autokorelasi



Gambar 2. Uji Tabel Durbin-Watson

Berdasarkan Gambar 4.1 diperoleh hasil bahwa model menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berada pada posisi $0 < d < d_U$ (Autokorelasi Positif). Hal ini mengindikasikan bahwa model tersebut mempunyai masalah autokorelasi positif. Masalah terjadinya autokorelasi dalam data panel tidak perlu dikhawatirkan karena pada dasarnya data panel merupakan data gabungan dari time series dan cross-section sehingga data panel sebenarnya menjadi sebuah salah satu cara penyembuhan dari permasalahan uji asumsi klasik. Terlebih karena metode yang dipakai adalah Fixed Effect Model dengan cross-section weight atau bentuk metode GLS (Generalized Least-square) dalam penelitian maka hasil output dapat disimpulkan bahwa metode GLS telah mengakomodasi permasalahan autokorelasi (Gujarati dan Porter, 2004).

3.2 Hasil Regresi Data Panel

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi

Uji	Cross section-stat	Prob.
Uji Chow	121.053837	0.0000
Uji Hausman	25.849917	0.0000

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai P-value yaitu sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai taraf nyata (α) 5 persen (0,05) maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect Model* lebih tepat dari *Common Effect Model* untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai P-value yaitu sebesar 0,0000. Karena nilai P-value lebih kecil dari nilai taraf nyata (α) 5 persen (0,05) maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect Model* lebih tepat dari *Random Effect model* untuk menganalisis penelitian ini.

3.3 Persamaan Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 8. Persamaan FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.53616	0.431367	154.2449	0.0000
PDDK	0.002516	0.009268	0.271500	0.7868
KES	0.178279	0.024989	7.134375	0.0000
TPT	-0.236113	0.074811	-3.156102	0.0023

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

3.4 Uji Hipotesis

3.4.1 Uji T-Statistik

Tabel 9. Uji T-Statistik

Variabel Bebas	Variabel Terikat (Y) = IPM				
	t-statistik	t-tabel	Probabilitas	Kesimpulan	Keterangan
PDDK	0.271500	1.662	0.7868	H_0 diterima	Tidak Signifikan
KES	7.134375	1.662	0.0000	H_0 ditolak	Signifikan
TPT	-3.156102	1.662	0.0023	H_0 ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 8 diketahui variabel belanja pendidikan (PDDK) sebesar 0.7868 $>$ (α) 5 persen (0,05) dan t-hitung (0.271500) $>$ t-tabel (1,662). Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Variabel belanja kesehatan (KES) sebesar 0.0000 $<$ (α) 5 persen (0,05) dan t-hitung (7.134375) $>$ t-tabel (1,662). Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0.0023 $<$ (α) 5 persen (0,05) dan t-hitung (-3.156102) $<$ t-tabel (1,662). Sehingga dapat

disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

3.4.2 Uji F

Tabel 10. Uji F

DF1	DF2	a	F-tabel	F-stat	Prob	Keterangan
3	86	0.05	2.68	139.5907	0.000	H ₀ ditolak

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Apabila nilai F-stat > F-table, maka tolak H₀, artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pada hasil output nilai F-stat (139.5907) > F-table (2,68) maka tolak H₀ artinya bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung 2015-2020.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi direpresentasikan dengan angka 0 hingga 1. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya. Dari hasil pengolahan data, diperoleh hasil koefisien determinasi (R²) sebesar 0.97, artinya variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat yang ada di dalam model sebesar 97%.

3.5 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada 2015-2020 dengan koefisien regresinya adalah sebesar 0.002516 pada tingkat kepercayaan 95%. Ini artinya, jika belanja pendidikan naik sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami kenaikan sebesar 0,25%, *ceteris paribus*.
2. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada 2015-2020 dengan koefisien regresinya adalah sebesar 0.178279 pada tingkat kepercayaan 95%. Ini artinya, jika belanja kesehatan naik sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami kenaikan sebesar 17,8%, *ceteris paribus*.
3. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada 2015-2020 dengan koefisien regresinya adalah sebesar -0.236113 pada tingkat kepercayaan 95%. Ini artinya, jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami penurunan sebesar 23,6%, *ceteris paribus*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian hipotesis yang ada dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

- a. Variabel belanja pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan usaha diterima
- b. Variabel jam kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan usaha industri skala mikro dan kecil. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan usaha ditolak
- c. Variabel teknologi internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha industri skala mikro dan kecil. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel teknologi internet berpengaruh terhadap pendapatan usaha diterima.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Tingkat Pengangguran Terbuka*.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2022. APBD. *Data Keuangan Daerah Mulai 2006*.
Diakses Melalui www.djpk.go.id
- Gujarati, D.N. (2004) *Basic Econometrics*, 4th edition, New York: The McGraw-Hill Companies.
- UNDP.2000. *Human Development Report*.www.google.com
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Alokasi Anggaran Pendidikan*.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 *Tentang Alokasi Anggaran Kesehatan*.